

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS

Surajiyo

Universitas Indraprasta PGRI

Email : drssurajiyo@yahoo.co.id

Abstract

Etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika Bisnis kadangkala disebut juga etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis berarti juga sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan mengusahakan barang dan jasa ke konsumen.

Etika bisnis harus dipandang sebagai unsur dalam usaha bisnis itu sendiri. Bisnis tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak akan berhasil. Tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip etis apakah yang harus dilakukan oleh pebisnis sehingga bisnis itu bisa berhasil.

Professional ethics is a branch of ethics which critically and systematically reflect moral problems in profession. Business ethics seldom also which is called management ethics is application morally standard in business action. Business is a action individual which organized to product and sell of things and favor for purposing of benefit in fulfill society needing. Business also means some action totally which include of agriculture, production, construction, distribution, transportation, communication, action of service and government which move in things and service product to consumer. Business ethics should be considered as a branch in the business product self. Business without ethics in long time just not be success. This article discuss principle of ethics about what should businessman be action , so that business could be success.

Kata Kunci : Etika, Moral, Profesi, Pebisnis.

PENDAHULUAN

Setiap bidang kehidupan manusia termasuk dalam wilayah pertanggungjawaban moral. Khususnya pemegang profesi harus dituntut dua hal yakni agar menjalankannya secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak pihak lain.

Sebagai pebisnis diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Orang-orang bisnis harus sadar tentang dimensi etis dan belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik dan etis maupun ekonomis dan bagaimana pertimbangan etis dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan. Etika bisnis termasuk etika profesi sehingga harus dikembangkan oleh para profesional orang-orang bisnis sendiri.

Berdasarkan keahlian khusus dalam bisnis, terbuka kemungkinan bagi kaum profesional pebisnis untuk mengeksploitasi klien atau subyek layanannya. Dengan kata lain profesi mengandung kemungkinan bahaya penyalahgunaan. Dari kenyataan bahwa profesi mengandung kemungkinan bahaya penyalahgunaan inilah maka menjadi jelas bahwa profesi tidak dapat dilepaskan dengan etika.

Suatu profesi bukan hanya suatu cara untuk mencari nafkah saja, melainkan suatu bidang pekerjaan yang menuntut suatu bidang pekerjaan yang memerlukan suatu standar kompetensi dan tanggung jawab. Karena profesi menyangkut tanggung jawab, maka termasuk dalam standar profesional yang ditetapkan oleh organisasi atau himpunan profesi guna menjamin mutu layanan dan juga melindungi hubungan kepercayaan dengan klien adalah standar etis yang perlu dipatuhi oleh pemegang profesi yang bersangkutan.

Muncul persoalan dalam profesi pebisnis, sebenarnya sikap-sikap etis apa yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis, agar dalam pelayanan kepada klien bisa menjadi baik, dan pada gilirannya usaha bisnis dapat berhasil dan berkembang baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu pembahasan untuk menjawab persoalan tersebut sarat dengan muatan filosofis terutama pendekatan secara etika.

ANTARA ETIKA, MORAL, DAN NORMA.

Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani 'Ethos' yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi, kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka 'etika' berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Menurut Bertens (1993, hal. 6-7) pengertian etika ada tiga pengertian, yaitu:

1. Etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya jika orang berbicara tentang 'etika suku-suku Indian', 'etika agama Budha', 'etika Protestan' Secara singkat arti ini bisa dirumuskan sebagai 'sistem nilai'.

2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya 'etika Rumah Sakit Indonesia' Etika Pariwisata'. Disini jelas 'etika' jelas dimaksudkan kode etik.
3. Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Jadi etika bisa juga diartikan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan/tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik buruk.

Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan.

Menurut Sunoto (1982) etika dapat dibagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya.

Moral berasal dari kata latin "mos" jamaknya "mores" yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.

Frans Magnis Suseno (1987) membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, peraturan-peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Norma ialah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segi tiga. Kemudian norma berarti sebuah ukuran. Pada perkembangannya norma diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Misalnya dalam suatu masyarakat pasti berlaku norma umum yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral.

ETIKA PROFESI

Kata profesi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diberi arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesi memang erat berkaitan dengan jabatan dan bidang pekerjaan, tetapi tidak semua jabatan dan bidang pekerjaan dapat disebut profesi. Secara tradisional, profesi hanya diperuntukkan bagi jabatan dan bidang pekerjaan kedokteran, pengacara, dan kependetaan atau imam. Baru kemudian jabatan dan bidang pekerjaan lain yang menyangkut layanan sosial dalam bidang pendidikan, bidang keamanan, bidang ilmu, bidang pengaturan bisnis, dan sebagainya juga dimasukkan dalam bidang profesi.

Rumusan profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut hanya bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu dapat disebut profesi. Pendidikan keahlian itu menurut J. Sudarminta (1994) meliputi macam-macam segi, yaitu :

1. Penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik profesi.
2. Penguasaan metode atau teknik intelektual yang merupakan semacam jembatan antara teori dan penerapannya dalam praktek.
3. Pemilikan kemampuan untuk menerapkan dalam praktik teknik intelektual tersebut pada urusan praktis.
4. Pemilikan kemampuan untuk menyelesaikan program latihan dan memperoleh ijazah, sertifikat atau tanda lulus untuknya.
5. Pemilikan pengalaman yang mencukupi di lapangan.

Selain menuntut pendidikan keahlian khusus, profesi juga berkaitan dengan bidang pekerjaan yang memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa bermaksud mencari keuntungan pribadi.

Setiap himpunan profesi biasanya merumuskan semacam kode etik, yakni suatu daftar kewajiban dalam menjalankan sebuah profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya (Suseno, 1991). Kode etik sebenarnya merupakan suatu rincian lebih lanjut dari norma-norma yang lebih umum yang dirumuskan dan dibahas dalam etika profesi. Kode etik merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas norma-norma tersebut, dengan memilih dari berbagai kemungkinan penataan norma-norma yang paling dibutuhkan dalam praktik pelaksanaan profesi yang bersangkutan.

Dengan demikian etika profesi secara singkat dapat dirumuskan sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dapat diartikan nilai-nilai dan asas-asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu dan wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tersebut.

Tuntutan etika profesi menurut Frans Magnis Suseno (1991) dapat dirumuskan dalam sebuah prinsip tanggung jawab yakni dalam segala usaha bertindaklah sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat tindakanmu tidak dapat merusak, bahkan tidak dapat membahayakan atau mengurangi mutu kehidupan manusia dalam

lingkungannya, baik mereka yang hidup pada masa sekarang, maupun generasi-generasi yang akan datang.

PRINSIP ETIKA PROFESI

Setiap pemegang profesi harus dituntut dua hal yakni :

1. Agar ia menjalankannya secara bertanggung jawab.
Tuntutan dasar dalam kehidupan manusia dan khusus dalam menjalankan segenap profesi adalah agar kita selalu bersikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam dua arah, yaitu :
 - a. Kita diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan dan terhadap hasilnya. Jadi agar kita bekerja dengan sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu.
Mutu ini mempunyai beberapa segi. Kita harus mengusahakan agar kita sendiri menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar kita kompeten. Kita harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang kita jalankan. Cara kita bekerja harus efisien dan efektif. Hasil pekerjaan kita harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang dapat diharapkan oleh pemakai/orang yang akan memanfaatkannya, tetapi tetap diusahakan agar lebih baik lagi.
 - b. Kita harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain. Misalnya, dampak pada buruh dan pegawai bawah, apakah mereka diperlakukan dengan wajar, dilibatkan dalam pengambilan kebijaksanaan, atau mendapat imbalan yang wajar? Kepentingan langganan, lingkungan, ancaman regional, nasional dan kepentingan negara; semuanya itu perlu diperhatikan.
2. Agar ia tidak melanggar hak-hak pihak lain.
Prinsip ini tak lain adalah tuntutan keadilan. Keadilan menuntut agar kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi tuntutan keadilan itu berarti di dalam pelaksanaannya kita tidak boleh melanggar hak orang , atau lembaga lain, atau pun hak negara. Jadi, kalau pelaksanaan profesi melanggar hak pihak ketiga, kita harus berhenti. Kepentingan usaha dan mereka yang langsung terlibat tidak memberikan hak untuk menganggap sepi hak orang lain. Hak pihak ketiga adalah batas bagi hak untuk menjalankan sebuah usaha.

MORALITAS PROFESI LUHUR

Tuntutan etika profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Terutama ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur, yakni:

1. Berani berbuat dengan bertekad.

Pertama dituntut agar ia bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Artinya, harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Ia bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja, jadi yang diselewengkan dari kewajiban oleh perasaan malu, malas, takut, sentimen, benci, orang yang asal diperintah oleh atasan, melupakan kewajibannya. Jadi, ia mesti orang bertekad yang tidak mundur dari apa yang diketahui merupakan kewajibannya, meskipun ia ditekan atau diancam.

2. Kesadaran berkewajiban.

Profesi harus mempunyai kesadaran tajam tentang tuntutan etika profesinya. Artinya, ia mentaatinya tidak hanya sebagai hobi, atau karena rekan-rekan profesi juga mentaatinya, melainkan karena yakin sedalam-dalamnya bahwa tuntutan etika profesi itu merupakan kewajiban yang berat.

3. Idealisme.

Semua tuntutan-tuntutan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang yang memiliki idealisme. Idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh, tanpa pamrih, mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya. Orang yang hanya pragmatis, apalagi yang hanya mencari kepentingannya sendiri tidak memadai bagi profesi luhur (Suseno, 1991)

CAKUPAN ETIKA BISNIS

Masalah etika bisnis atau etika usaha akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya dunia usaha di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menuntut pula praktik bisnis yang etis. Dalam ekonomi pasar global, kita hanya bisa survive jika mampu bersaing. Untuk bersaing harus ada daya saing yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisien. Untuk itu pula, diperlukan etika dalam berusaha atau yang dikenal dengan etika bisnis karena praktik berusaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam berbisnis.

Richard T. De George (1986) dalam Teguh Wahyono (2006, p. 155-156) memberikan empat macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis.

1. Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis.
2. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan '*meta-etika*' yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.
3. Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.

4. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi.

Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat dan sebaliknya mendekati permasalahan yang terjadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Etika bisnis akan membuat pengertian bahwa bisnis tidak sekedar bisnis, melainkan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia sehingga harus dilakukan secara 'manusiawi' pula.

Etika bisnis akan memberikan pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang 'berhasil', tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Jika disimpulkan, etika bisnis memiliki tujuan yang paling penting yaitu menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen. Etika bisnis juga menghalau pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang 'kotor' penuh muslihat dan dipenuhi oleh orang-orang yang menjalankan usahanya dengan licik.

TEORI ETIKA BISNIS

Teori Etika Bisnis ada Teori Teleologi dan Teori Deontologi. Teori Teleologi adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat.

Teori Deontologi yaitu : berasal dari bahasa Yunani , "*Deon*" berarti tugas dan "*logos*" berarti pengetahuan. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakanyang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. (dalam <https://dianpurnamasari1004.wordpress.com/2013/10/07/teori-etika-bisnis/> diakses tanggal 8 Februari 2016)

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Bisnis Jepang akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut dan seterusnya. Demikian pula prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Indonesia.

Tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, secara umum menurut Sonny Keraf (1998) ada beberapa prinsip etika bisnis yakni :

1. Prinsip otonomi.

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Jadi orang yang otonom adalah orang yang tahu akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakannya. Kesiediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral. Orang yang bermoral adalah orang yang selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Secara khusus dalam dunia bisnis, tanggung jawab moral yang diharapkan dari setiap pelaku bisnis yang otonom mempunyai dua arah, yakni tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab moral yang tertuju kepada semua pihak terkait yang berkepentingan (stakeholders) yakni konsumen, penyalur, pemasok, investor, atau kreditor, karyawan, masyarakat luas, relasi-relasi bisnis .

2. Prinsip kejujuran.

Ada tiga lingkup kegiatan bisnis modern yang sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat. Ketiga itu adalah:

- a. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara a priori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan lebih dari itu serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi kepentingan

- masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya.
- b. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok.
 - c. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kejujuran dalam perusahaan justru inti dan kekuatan perusahaan itu.

3. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

4. Prinsip saling menguntungkan.

Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini bisa mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.

5. Prinsip integritas moral.

Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.

Sejalan dengan pendapat Sonny Keraf tersebut adalah menurut Frans Magnis Suseno (1991) bahwa sebuah usaha bisnis hanya dapat lestari dan berkembang baik dalam jangka waktu menengah dan panjang apabila usaha itu berdasarkan: saling kepercayaan, dan kepentingan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh adanya usaha itu, merasa secukupnya diperhatikan. Oleh karena itu unsur etika bisnis yang pertama adalah atas dasar saling percaya hubungan bisnis yang lestari dapat dibangun. Dalam jangka panjang hubungan bisnis yang benar-benar menguntungkan, memerlukan saling kepercayaan, dan itu mengandaikan bahwa bisnisan jujur terhadap yang lain. Jadi, kejujuran merupakan salah satu prasyarat keberhasilan bisnis. Tanpa kejujuran saling kepercayaan tidak dapat tumbuh, dan tanpa saling kepercayaan bisnis tidak dapat maju. Kejujuran, dan sikap-sikap etis pada umumnya, tidak sekedar merupakan tuntutan moral, melainkan termasuk tuntutan efisiensi bisnis sendiri.

Sikap terhadap pekerjaan yang perlu dimiliki orang bisnis agar ia secara mental memadai dengan job-nya menurut Frans Magnis Suseno (1991) adalah tekad untuk tak pernah menipu, tekad untuk tidak melepaskan sesuatu dari tangannya yang tidak mencapai mutu yang seharusnya, cinta pada mutu/kualitas hasil produksinya dan kemampuan untuk merasa bangga apabila kualitasnya baik, lepas dari laku-tidaknya, ia mendahulukan kemajuan perusahaannya terhadap keuntungannya sendiri, maka

ia tak pernah akan melakukan korupsi terhadap perusahaannya sendiri, ia bangga atas kemajuan usahanya. Ia tidak tahan melihat perusahaannya terlantar, kotor, tidak efisien. Ia secara emosional terlibat padanya dan tidak menganggapnya semata-mata sebagai sarana pendapatan pribadinya.

Unsur etika bisnis yang kedua adalah kepentingan semua pihak diperhatikan oleh bisnismen. Stake-holders-approach menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepentingan semua pihak yang secara nyata berkepentingan dalam usaha bukan hanya merupakan tuntutan etika bisnis, melainkan jaminan terbaik agar perusahaan itu dalam jangka panjang dapat berkembang dengan baik.

Jadi, pimpinan bisnis yang bijaksana tidak hanya mencari untung sendiri saja melainkan akan memperhatikan semua pihak yakni manajemen, para karyawan dan buruh, pemilik, langganan/konsumen dan langganan/produsen, dan orang-orang yang secara tidak langsung terlibat seperti orang-orang di sekitarnya, dari segi kesempatan kerja, dari apakah perusahaan itu menguntungkan atau merugikan *local business people*, dari dampaknya pada sarana lalu lintas, lingkungan hidup, pemerintah daerah, negara dan umat manusia pada umumnya. Jadi perhatian pada semua pihak yang terkena oleh tindakan kita adalah salah satu tuntutan etika yang paling dasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik simpulan :

1. Etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi.
2. Prinsip umum Etika Bisnis selain tidak melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, pelaku bisnis harus mempunyai prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan integritas moral.
3. Untuk dapat menjamin profesional dalam bisnis, maka sebuah usaha bisnis hanya dapat lestari dan berkembang baik dalam jangka panjang apabila usaha itu berdasarkan saling kepercayaan, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh adanya usaha bisnis termasuk bisnis di bidang teknologi informasi.

Saran :

1. Betapapun buruknya situasi dalam dunia bisnis, sebagian besar orang-orang bisnis yang sungguh merindukan alam bisnis yang menuruti etika bisnis yang sehat, yakni melakukan bisnis yang solid, tangguh, dapat dipercaya, yang maju karena mutunya, yang bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat luas dan negara.
2. Etika bisnis adalah masalah efisiensi bisnis. Hanya kalau bisnis dalam negara ini dijalankan menurut standar-standar etika bisnis yang pantas, perekonomian negara dapat menjadi sehat dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hamami M., "Etika Keilmuan", 1996, dalam Ali Mudhofir dkk, *Filsafat Ilmu*, Liberty bekerja sama dengan YP Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Bertens, K., 1993, *Etika*, PT Gramedia, Jakarta.
- Parmono, R., "Manusia Susila merupakan Perkembangan Fitrah Manusia Sendiri", 1983, dalam *Beberapa Pemikiran Kefilsafatan*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis dkk., 1991, *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1987, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 1991, *Berfilsafat Dari Konteks*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudarminta, J., "Etika Profesi Bagi Dosen", 1994, dalam D. Moedjanto MA, *Tantangan Kemanusiaan Universal Antologi Filsafat, Budaya, Sejarah Politik dan Sastra*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan keempat.
- Sunoto, 1982, *Bunga Rampai Filsafat*, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Surajiyo, *Etika Profesi bagi Dosen*, Dalam Majalah WIDYA, Januari 1998, No. 148 Tahun XV.
- Wahyono, Teguh, 2006, *Etika Komputer dan tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- <https://dianpurnamasari1004.wordpress.com/2013/10/07/teori-etika-bisnis/> diakses Tanggal 8 Februari 2016.